



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan:

|                                                     |     |                      |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                  | Rp. | 347.309.619.000,00   |
| 2. Dana Perimbangan sejumlah                        | Rp. | 1.683.354.032.000,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah<br>sejumlah | Rp. | 603.445.245.000,00   |
| Jumlah Pendapatan                                   | Rp. | 2.634.108.896.000,00 |

b. Belanja:

|                               |     |                      |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung     |     |                      |
| a) Belanja Pegawai            | Rp. | 1.144.831.615.000,00 |
| b) Belanja Hibah              | Rp. | 31.651.200.000,00    |
| c) Belanja Bantuan Sosial     | Rp. | 46.546.354.000,00    |
| d) Belanja Bagi Hasil         | Rp. | 14.014.824.000,00    |
| e) Belanja Bantuan Keuangan   | Rp. | 491.544.365.000,00   |
| f) Belanja Tidak Terduga      | Rp. | 1.000.000.000,00     |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.729.588.358.000,00 |
| 2. Belanja Langsung           |     |                      |
| a) Belanja Pegawai            | Rp. | 65.216.345.000,00    |
| b) Belanja Barang dan Jasa    | Rp. | 579.787.205.000,00   |
| c) Belanja Modal              | Rp. | 425.399.483.000,00   |
| Jumlah Belanja Langsung       | Rp. | 1.070.403.033.000,00 |
| Jumlah Belanja                | Rp. | 2.799.991.391.000,00 |
| Surplus/(Defisit)             | Rp. | (165.882.495.000,00) |

c. Pembiayaan:

|                                                   |     |                    |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Pembiayaan Penerimaan                          | Rp. | 177.632.495.000,00 |
| 2. Pembiayaan Pengeluaran                         | Rp. | 11.750.000.000,00  |
| Pembiayaan Netto                                  | Rp. | 165.882.495.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun<br>Berkenaan | Rp. | 00,00              |

- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : Dinas Pendidikan
  - b.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah
  - c.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan
  - d.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puring
  - e.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan
  - f.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong
  - h.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren
  - i.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal
  - j.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit
  - k.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorowo
  - l.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun
  - m.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso
  - n.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutowinangun
  - o.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
              Organisasi                : Dinas Pendidikan  
              Sub Unit Organisasi        : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alian

|     |                         |                         |                                         |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| p.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Poncowarno                    |
| q.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Kebumen                       |
| r.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Pejagoan                      |
| s.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Sruweng                       |
| t.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Adimulyo                      |
| u.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Kuwarasan                     |
| v.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Rowokele                      |
| w.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Sempor                        |
| x.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Gombong                       |
| y.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Karanganyar                   |
| z.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Karanggayam                   |
| aa. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Karangsambung                 |
| bb. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Pendidikan  | Kecamatan Sadang                        |
| cc. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Ayah           |                                         |
| dd. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pendidikan | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |

|     |                     |                                           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------|
| ee. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Ayah                             |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| ff. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Buayan                           |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| gg. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Buayan                           |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| hh. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Puring                           |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| ii. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Puring                           |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| jj. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Petanahan                        |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| kk. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Klirong                          |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| ll. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Buluspesantren                   |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| mm. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Buluspesantren                   |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| nn. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Ambal                            |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| oo. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Ambal                            |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| pp. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Mirit                            |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| qq. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Mirit                            |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| rr. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Prembun                          |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| ss. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 2 Prembun                          |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |
| tt. | Sub Unit Organisasi | : SMPN 1 Kutowinangun                     |
|     | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan |
|     | Organisasi          | : Dinas Pendidikan                        |

|      |                         |                                                                 |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Kutowinangun                                           |
| uu.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 3 Kutowinangun                                           |
| vv.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Alian                                                  |
| ww.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Poncowarno                                             |
| xx.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Kebumen                                                |
| yy.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Kebumen                                                |
| zz.  | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 3 Kebumen                                                |
| aaa. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 4 Kebumen                                                |
| bbb. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 5 Kebumen                                                |
| ccc. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 6 Kebumen                                                |
| ddd. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 7 Kebumen                                                |
| eee. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Pejagoan                                               |
| fff. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Pejagoan                                               |
| ggg. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Sruweng                                                |
| hhh. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Sruweng                                                |
| iii. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Adimulyo                                               |
| jjj. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |

|      |                         |                                                                 |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Adimulyo                                               |
| kkk. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Kuwarasan                                              |
| lll. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Rowokele                                               |
| mmm. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Sempor                                                 |
| nnn. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Sempor                                                 |
| ooo. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Gombang                                                |
| ppp. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Gombang                                                |
| qqq. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 3 Gombang                                                |
| rrr. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 4 Gombang                                                |
| sss. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Karanganyar                                            |
| ttt. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Karanganyar                                            |
| uuu. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 3 Karanganyar                                            |
| vvv. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Karanggayam                                            |
| www. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Karanggayam                                            |
| xxx. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Karangsambung                                          |
| yyy. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|      | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Karangsambung                                          |
| zzz. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |

|       |                         |                                                                 |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Padureso                                               |
| aaaa. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|       | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 2 Rowokele                                               |
| bbbb. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|       | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Sadang                                                 |
| cccc. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan<br>: Dinas Pendidikan |
|       | Sub Unit Organisasi     | : SMPN 1 Bonorowo                                               |
| dddd. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Dinas Kesehatan                                               |
| eeee. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Alian                           |
| ffff. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah I                          |
| gggg. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah II                         |
| hhhh. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Buayan                          |
| iiii. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanganyar                     |
| jjjj. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam I                   |
| kkkk. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam II                  |
| llll. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karangsambung                   |
| mmmm. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kutowinangun                    |
| nnnn. | Urusan Wajib Organisasi | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan<br>: Dinas Kesehatan   |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Pejagoan                        |

|       |                         |                                                                   |                                                                                            |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| oooo. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Poncowarno                        |                                                                                            |
| pppp. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Prembun                           |                                                                                            |
| qqqq. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rowokele                          |                                                                                            |
| rrrr. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sadang                            |                                                                                            |
| ssss. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor I                          |                                                                                            |
| tttt. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor II                         |                                                                                            |
| uuuu. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Kesehatan                                            | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sruweng                           |                                                                                            |
| vvvv. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Rumah Sakit Umum Daerah                                    | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     |
|       | Sub Unit Organisasi     | : RSUD dr. Sudirman                                               |                                                                                            |
| www.  | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                                                                            |
| xxxx. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah                             |                                                                                            |
| yyyy. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                        |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup      |                                                                                            |
| zzzz. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                         | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                              |                                                                                            |
| aaaa. | Urusan Wajib Organisasi | :<br>: Satuan Polisi Pamong Praja                                 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
|       | Sub Unit Organisasi     | : Satuan Polisi Pamong Praja                                      |                                                                                            |

|         |                     |                                                                                           |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| bbbbbb. | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial                                                     |
|         | Organisasi          | : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |
| cccccc. | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja                                         |
|         | Organisasi          | : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                               |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                               |
| dddddd. | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil                  |
|         | Organisasi          | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                 |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                 |
| eeeeee. | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa                         |
|         | Organisasi          | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| fffff.  | Urusan Wajib        | : Perhubungan                                                                             |
|         | Organisasi          | : Dinas Perhubungan                                                                       |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Perhubungan                                                                       |
| ggggg.  | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika                           |
|         | Organisasi          | : Dinas Komunikasi dan Informatika                                                        |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Komunikasi dan Informatika                                                        |
| hhhhh.  | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal                                      |
|         | Organisasi          | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                  |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                  |
| iiii.   | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga                             |
|         | Organisasi          | : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata                                           |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata                                           |
| jjjj.   | Urusan Wajib        | : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan                                            |
|         | Organisasi          | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                        |
|         | Sub Unit Organisasi | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                        |
| kkkkk.  | Urusan Pilihan      | : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan                                                   |
|         | Organisasi          | : Dinas Kelautan dan Perikanan                                                            |

|        |                     |                                                                  |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|        | Sub Unit Organisasi | : Dinas Kelautan dan Perikanan                                   |
| lllll. | Urusan Pilihan      | : Urusan Pilihan Pertanian                                       |
|        | Organisasi          | : Dinas Pertanian dan Pangan                                     |
|        | Sub Unit Organisasi | : Dinas Pertanian dan Pangan                                     |
| mmmmm. | Urusan Pilihan      | : Urusan Pilihan Perdagangan                                     |
|        | Organisasi          | : Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            |
|        | Sub Unit Organisasi | : Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            |
| nnnnn. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |
|        | Sub Unit Organisasi | : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |
| ooooo. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat Daerah                                             |
|        | Sub Unit Organisasi | : Bagian Hukum                                                   |
| ppppp. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat Daerah                                             |
|        | Sub Unit Organisasi | : Bagian Perekonomian                                            |
| qqqqq. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat Daerah                                             |
|        | Sub Unit Organisasi | : Bagian Organisasi                                              |
| rrrrr. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat Daerah                                             |
|        | Sub Unit Organisasi | : Bagian Umum                                                    |
| sssss. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat Daerah                                             |
|        | Sub Unit Organisasi | : Bagian Hubungan Masyarakat                                     |
| ttttt. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Sekretariat DPRD                                               |
|        | Sub Unit Organisasi | : Sekretariat DPRD                                               |
| uuuuu. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Kecamatan Kebumen                                              |
|        | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Kebumen                                              |
| vvvvv. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Kecamatan Kebumen                                              |
|        | Sub Unit Organisasi | : Kelurahan Kebumen                                              |
| wwwww. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|        | Organisasi          | : Kecamatan Alian                                                |
|        | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Alian                                                |

|         |                     |                                                                  |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| xxxxxx. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Karangsambung                                        |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Karangsambung                                        |
| yyyyyy. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Prembun                                              |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Prembun                                              |
| zzzzzz. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Mirit                                                |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Mirit                                                |
| aaaaaa. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Kutowinangun                                         |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Kutowinangun                                         |
| bbbbbb. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Ambal                                                |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Ambal                                                |
| cccccc. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Buluspesantren                                       |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Buluspesantren                                       |
| dddddd. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Pejagoan                                             |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Pejagoan                                             |
| eeeeee. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Klirong                                              |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Klirong                                              |
| fffff.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Petanahan                                            |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Petanahan                                            |
| gggggg. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Sruweng                                              |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Sruweng                                              |
| hhhhhh. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Karanganyar                                          |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Karanganyar                                          |
| iiiiii. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|         | Organisasi          | : Kecamatan Karanggayam                                          |
|         | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Karanggayam                                          |

|          |                     |                                                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| jjjjj.   | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Adimulyo                                             |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Adimulyo                                             |
| kkkkkk.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Kuwarasan                                            |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Kuwarasan                                            |
| lllll.   | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Puring                                               |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Puring                                               |
| mmmmm m. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Gombang                                              |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Gombang                                              |
| nnnnnn.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Sempor                                               |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Sempor                                               |
| oooooo.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Buayan                                               |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Buayan                                               |
| pppppp.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Rowokele                                             |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Rowokele                                             |
| qqqqqq.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Ayah                                                 |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Ayah                                                 |
| rrrrrr.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Sadang                                               |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Sadang                                               |
| ssssss.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Poncowarno                                           |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Poncowarno                                           |
| tttttt.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Padureso                                             |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Padureso                                             |
| uuuuuu.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Kecamatan Bonorowo                                             |
|          | Sub Unit Organisasi | : Kecamatan Bonorowo                                             |

|          |                     |                                                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| vvvvvv.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan                |
|          | Organisasi          | : Inspektorat                                                    |
|          | Sub Unit Organisasi | : Inspektorat                                                    |
| wwwwww.  | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan               |
|          | Organisasi          | : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah       |
|          | Sub Unit Organisasi | : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah       |
| xxxxxxx. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan                  |
|          | Organisasi          | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                     |
|          | Sub Unit Organisasi | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                     |
| yyyyyyy. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                     |
|          | Sub Unit Organisasi | : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                              |
| zzzzzzz. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan                  |
|          | Organisasi          | : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                            |
|          | Sub Unit Organisasi | : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                            |
| aaaaaaa. | Urusan Wajib        | : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
|          | Organisasi          | : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah             |
|          | Sub Unit Organisasi | : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah             |

- (4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, CXLV, CXLVI, XCLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV, CLVI, dan CLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Maret 2018  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006